



DPRD DKI Dukung Ahok

Beberkan Harta Pejabat

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Ahok memerintahkan pejabat buka-bukaan kekayaannya. Hal ini mendapat dukungan kalangan DPRD DKI Jakarta karena dinilai sebagai sikap berani mewujudkan transparansi birokrasi. *Ke Hlm. 7 kol. 4*

KMP Dipersilakan Masuk Kabinet

JAKARTA (Pos Kota) – PDIP mempersilakan Presiden Jokowi melakukan reshuffle dan mengambil politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP) masuk kabinet. *Ke Hlm. 7 kol. 4*

Berita Dari Halaman 1

“Silakan saja. Semua pejabat harus mengumumkan kekayaannya. Itu kebijakan bagus,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, Rabu (1/7).

Hanya saja Bestari mengingatkan agar instruksi Ahok tersebut tidak membuat fokus pejabat terpecah dalam menjalankan program pembangunan tahun ini. “Mereka jangan sibuk bikin laporan kekayaan untuk dipublikasi, tapi program kerjanya terbengkalai,” sambungnya.

PUNYA LUKISAN RP3,5 MILIAR

Sebelumnya selain memerintahkan pejabat harus melaporkan kekayaannya, Ahok juga membeberkan seputar pejabat yang membeli lukisan Van Gogh senilai Rp3,5 miliar. Tetapi sayangnya Ahok tidak membeberikan identitas pejabat bersangkutan. “Agar tidak jadi

fitnah sebaiknya buka saja nama pejabat yang membeli lukisan hingga Rp3,5 miliar,” ucap Bestari.

Hal yang sama juga diungkapkan Selamat Nurdin, ketua Fraksi Partai Keadilan DPRD DKI Jakarta. Langkah Ahok membeberkan kekayaan pejabat DKI harus didukung. Alasannya bukan rahasia lagi bila banyak pejabat DKI memiliki kekayaan berlebihan.

“Entah dari mana dapatnya. Kalau memang tidak wajar biar masyarakat yang menilai,” ujar Selamat. “Ahok juga harus telusuri juga pejabat yang ngumpein hartanya.”

Seperti diberitakan Pos Kota, Rabu (1/7), Ahok telah menginstruksikan seluruh pejabat DKI untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHK-PN). Laporan tersebut akan dimasukkan ke program Jakarta Smart City, sehingga masyarakat bisa memantau kekayaan pejabat.

MATIKAN 4000 KEGIATAN

Sementara itu, Gubernur Ahok mematikan sebanyak 4.000 kegiatan dalam APBD 2015. Selain karena tidak cukup waktu pelaksanaan, Ahok juga menemukan adanya penggelembungan atau mark up anggaran.

Ia tak memperlakukan penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Asalkan tidak terjadi pemborosan APBD. Beberapa kegiatan yang masih ditemukan mark up anggaran seperti pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Pancoran senilai Rp 48 miliar. Namun setelah dihitung kembali ternyata hanya memerlukan Rp 35 miliar.

Dengan mematikan ribuan kegiatan ini akan berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Agar penyerapan bisa dimaksimalkan, Ahok pun akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada sejumlah BUMD. *(guruh/john/st/o)*